



**LAPORAN KEUANGAN
(DANA KEISTIMEWAAN)
PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY
TAHUN ANGGARAN 2022
(UNAUDITED)**



YOGYAKARTA

2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Paniradya Kaistimewan DIY , menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2022 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 294 dan 295 yang menyebutkan bahwa :

“Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Secara ringkas Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI DANA KEISTIMEWAAN

Laporan Realisasi Dana Keistimewaan menggambarkan perbandingan antar dana keistimewaan Tahun Anggaran 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja ditetapkan sebesar	Rp	27.420.562.280,00
Realisasinya sebesar	Rp	26.762.651.487,00
Sehingga kurang dari anggaran sebesar	Rp	657.910.793,00
Atau sebesar 97,60 %		
B. Surplus/Defisit Anggaran ditetapkan sebesar Rp (26.762.651.487,00) dengan realisasi sebesar Rp 27.420.562.280,00 atau sebesar 97,60 %		

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Paniradya Kaistimewan DIY mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada 31 Desember 2022.

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar	Rp.	11.553.248.491,92
yang terdiri dari Aset Lancar sebesar	Rp.	169.427.600,00
Aset Tetap Sebesar	Rp.	11.383.820.891,92
Aset Lainnya	Rp.	223.891.200,00
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar	Rp.	0,00
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar	Rp.	11.553.248.491,92

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Paniradya Kaistimewan DIY untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan-LO	Rp.	0,00
Beban, terdiri dari :	Rp.	25.548.666.216,44
Beban Operasi-LO	Rp.	24.155.351.856,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	24.155.351.856,00
Surplus/Defisit - Laporan Operasional	Rp.	(25.548.666.216,44)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp.	4.171.996.915,36
Surplus/Defisit - LO	Rp.	(25.548.666.216,44)
RK PPKD	Rp.	26.762.651.487,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	6.167.266.306,00
Ekuitas Akhir	Rp.	11.553.248.491,92

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta peristiwa penting setelah tanggal pelaporan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan menggunakan basis kas yaitu pada saat diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Sementara dalam penyajian Neraca dan Laporan Operasional pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, Beban dan Transfer menggunakan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan Tahun Anggaran 2022 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*).

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan yang transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Desember 2022
PANIRADYA PATI

Aris Eko Nugroho, S.P, M.Si
NIP. 19721101 199703 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	
LAPORAN REALISASI DANA KEISTIMEWAAN (LRA).....	
LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	
NERACA.....	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	6
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	11
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD.....	33
BAB V PENUTUP.....	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
1. Rincian LRA menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	
2. Rincian LRA menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi	
3. Penjabaran LRA	
4. Berita Acara Penutupan Kas	
5. Register Penutupan Kas	
6. Berita Acara Pemeriksaan Kas	
7. Register Pemeriksaan Kas	
8. Rekapitulasi Belanja Barang Jasa (Pakai Habis)	
9. Berita Acara Stock Opname Persediaan	
10. Rekapitulasi Belanja Modal (Aset Tetap)	
11. Kertas Kerja Aset Tetap dan Aset Lainnya	
12. Kertas Kerja Mutasi Persediaan	
13. Rekap Penyusutan Aset Tetap dan Rekap Penyusutan Aset Lain-lain	
14. Rekap Buku Inventaris Klasifikasi <i>Intracountable</i> per 31 Desember 2022	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran , (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Yogyakarta, 31 Desember 2022
PANIRADYA PATI

Aris Eko Nugroho, S.P, M.Si
NIP. 19721101 199703 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827));
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

- Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 8);
 17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9);
 18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
 20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);
 21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
 22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56);
 23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
 24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 124);
 25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);
 26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);

27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104).
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 64);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

3.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

3.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1 Belanja

3.1.2 Aset

3.1.3 Ekuitas

3.1.4 Beban

3.1.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan SKPD

Bab V Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Uraian	Jumlah		Bertambah/ Berkurang	%
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	
BELANJA DAERAH	Rp27.420.562.280	Rp26.762.651.487	Rp657.910.793	97,60
Paniradya Kaistimewan	Rp27.420.562.280	Rp26.762.651.487	Rp657.910.793	97,60
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp6.956.530.806	Rp6.890.049.016	Rp66.481.790	99,04
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp16.670.000	Rp15.371.000	Rp1.299.000	92,21
Sub Kept Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp7.302.500	Rp6.067.500	Rp1.235.000	83,09
Sub Kept Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Rp6.337.500	Rp6.313.500	Rp24.000	99,62
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp3.030.000	Rp2.990.000	Rp40.000	98,68
Sub Kept Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp6.515.074.756	Rp6.465.786.822	Rp49.287.934	99,24
Sub Kept Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.473.389.756	Rp6.424.503.822	Rp48.885.934	99,24
Sub Kept Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp36.420.000	Rp36.140.000	Rp280.000	99,23
Sub Kept Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp1.300.000	Rp1.260.000	Rp40.000	96,92
Sub Kept Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Rp3.965.000	Rp3.883.000	Rp82.000	97,93
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp9.600.000	Rp9.600.000		100

Sub Kejt Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp9.600.000	Rp9.600.000		100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp179.717.250	Rp176.328.500	Rp3.388.750	98,11
Sub Kejt Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp3.374.000	Rp3.346.000	Rp28.000	99,17
Sub Kejt Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp13.288.000	Rp12.570.000	Rp718.000	94,60
Sub Kejt Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp6.170.000	Rp6.120.000	Rp50.000	99,19
Sub Kejt Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp17.111.250	Rp16.715.250	Rp396.000	97,69
Sub Kejt Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp9.420.000	Rp9.420.000		100
Sub Kejt Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp130.354.000	Rp128.157.250	Rp2.196.750	98,31
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp10.000.000	Rp9.864.200	Rp135.800	98,64
Sub Kejt Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp10.000.000	Rp9.864.200	Rp135.800	98,64
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp225.468.800	Rp215.652.100	Rp9.816.700	95,65
Sub Kejt Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp34.800.500	Rp34.800.500		100
Sub Kejt Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp177.368.300	Rp167.551.600	Rp9.816.700	94,47
Sub Kejt Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp13.300.000	Rp13.300.000		100

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Rp20.464.031.474	Rp19.872.602.471	Rp591.429.003	97,11
Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Rp1.117.320.500	Rp1.037.056.990	Rp80.263.510	92,82
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Rp729.185.000	Rp691.173.990	Rp38.011.010	94,79
Sub Kegt Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Rp388.135.500	Rp345.883.000	Rp42.252.500	89,11
Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Rp1.182.807.880	Rp1.118.164.150	Rp64.643.730	94,53
Sub Kegt Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Rp802.550.000	Rp776.600.900	Rp25.949.100	96,77
Sub Kegt Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Rp380.257.880	Rp341.563.250	Rp38.694.630	89,82
Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp1.728.361.000	Rp1.609.353.350	Rp119.007.650	93,11
Sub Kegt Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp994.452.000	Rp957.780.400	Rp36.671.600	96,31
Sub Kegt Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp733.909.000	Rp651.572.950	Rp82.336.050	88,78
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Rp4.705.713.322	Rp4.610.577.290	Rp95.136.032	97,98

Sub Kejt Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rp2.571.969.322	Rp2.526.352.470	Rp45.616.852	98,23
Sub Kejt Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Rp2.133.744.000	Rp2.084.224.820	Rp49.519.180	97,68
Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Rp3.087.892.772	Rp3.056.841.851	Rp31.050.921	98,99
Sub Kejt Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	Rp3.087.892.772	Rp3.056.841.851	Rp31.050.921	98,99
Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	Rp711.936.000	Rp709.805.000	Rp2.131.000	99,70
Sub Kejt Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Rp711.936.000	Rp709.805.000	Rp2.131.000	99,70
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Rp7.930.000.000	Rp7.730.803.840	Rp199.196.160	97,49
Sub Kejt Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Rp7.930.000.000	Rp7.730.803.840	Rp199.196.160	97,49

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Belanja makan minum rapat tidak terserap maksimal dikarenakan sesuai kehadiran peserta rapat
2. Penyerapan honor narasumber karena beberapa narasumber tidak dapat hadir dan menolak menerima honor serta adanya penyesuaian jabatan atau golongan narasumber
3. Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan tidak terserap maksimal karena menyesuaikan kebutuhan kendaraan
4. Belanja perjalanan dinas tidak terserap karena akomodasi narasumber dari pusat berhalangan hadir serta penyesuaian harga tiket pesawat dan hotel
5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer tidak terserap maksimal dikarenakan menyesuaikan harga pasar
6. Uang saku non PNS yang tidak terserap maksimal dikarenakan jumlah peserta non PNS yang hadir lebih sedikit dari yang dianggarkan.
7. Belanja alat tulis kantor tidak terserap maksimal karena menyesuaikan kebutuhan.

8. Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian dan belanja obat-obatan tidak terserap maksimal karena menyesuaikan kebutuhan.
9. Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, suku cadang alat angkutan, tidak terserap maksimal karena menyesuaikan kebutuhan.
10. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang gedung kantor atau bangunan karena menyesuaikan kebutuhan dan harga pasar
11. Minimnya jumlah SDM penunjang pencapaian kinerja Paniradya Kaistimewan

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

	2022	2021 (Audited)
3.1.1. Belanja	<u>26.762.651.487,00</u>	<u>21.184.928.416,00</u>

Belanja Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 27.420.562.280,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.762.651.487,00 atau 97,60%. Rincian realisasi Belanja terdiri dari :

	2022	2021 (Audited)
3.1.1.1. Belanja Operasi	<u>24.187.014.636,00</u>	<u>18.797.723.507,00</u>

Belanja Operasi Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar 24.814.838.758 dengan realisasi sebesar 24.187.014.636,00 atau 97,47%. Rincian realisasi Belanja terdiri dari :

	2022	2021 (Audited)
3.1.1.1.1. Belanja Pegawai	<u>6.467.690.216,00</u>	<u>5.722.670.432,00</u>

Belanja Pegawai Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 6.519.409.756 dengan realisasi sebesar Rp 6.467.690.216,00 atau 99,21 %. Rincian realisasi Belanja Pegawai terdiri dari:

Tabel 1
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Belanja Pegawai	6.467.690.216,00	5.722.670.432,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.858.620.263,00	2.804.957.448,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.172.401.874,00	2.285.537.020,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.643.227.700,00	1.846.542.800,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	529.174.174,00	438.994.220,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	141.188.590,00	149.509.384,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	141.188.590,00	149.509.384,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	177.080.000,00	185.000.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	177.080.000,00	185.000.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	27.730.000,00	27.500.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	27.730.000,00	27.500.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	45.555.000,00	54.620.000,00

ASN		
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	45.555.000,00	54.620.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	91.973.400,00	96.246.180,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	91.973.400,00	96.246.180,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.777.361,00	6.519.297,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.777.361,00	6.519.297,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.468,00	25.567,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.468,00	25.567,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	180.933.396,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	162.673.236,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	18.260.160,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.465.663,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.376.248,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.089.415,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.490.511,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.128.743,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.361.768,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.563.329.953,00	2.881.572.984,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.518.825.259,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.406.349.296,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	112.475.963,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	298.469.089,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	298.469.089,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	86.575.302,00	0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	86.575.302,00	0,00
---	---------------	------

2022

2021 (Audited)

3.1.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa Rp 17.719.324.420,00 Rp13.075.053.075,00

Belanja Barang dan Jasa Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 18.295.429.002 dengan realisasi sebesar Rp 18.295.429.002 atau 96,85%. Rincian realisasi Belanja Barang Dan Jasa terdiri dari:

Tabel 2
Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Belanja Barang dan Jasa	17.719.324.420,00	13.075.053.075,00
Belanja Barang	2.300.940.290,00	1.439.887.925,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.300.940.290,00	1.439.887.925,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	129.959.000,00	80.899.900,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	29.488.000,00	32.307.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	7.200.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	1.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	47.439.500,00	129.108.150,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	56.797.000,00	41.552.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	785.026.750,00	557.452.375,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.850.000,00	6.160.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	95.132.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.506.000,00	896.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	54.414.000,00	141.100.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	38.331.000,00	9.567.000,00

Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.410.000,00	1.785.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	648.647.000,00	388.160.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.500.000,00	12.500.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	4.500.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	30.700.000,00	0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	223.740.040,00	3.200.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	130.000.000,00	22.500.000,00
Belanja Jasa	12.602.444.610,00	10.245.502.700,00
Belanja Jasa Kantor	8.578.838.430,00	7.581.548.700,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	9.600.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	496.350.000,00	395.925.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	516.000.000,00	676.120.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	3.000.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.837.900.000,00	1.651.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.053.750.000,00	678.750.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	337.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	900.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	176.000.000,00	419.200.000,00
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	101.650.000,00	149.000.000,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	34.077.000,00	34.900.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	619.005.190,00	981.605.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.708.525.440,00	2.216.644.500,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat	9.084.000,00	8.676.000,00

Kabar/Majalah		
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.864.200,00	7.500.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.632.600,00	11.428.200,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.248.635.000,00	585.035.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	3.500.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	14.100.000,00	10.200.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	109.000.000,00	62.000.000,00
Belanja Sewa Mebel	5.540.000,00	2.085.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	268.000.000,00	146.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	198.495.000,00	11.250.000,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	211.500.000,00	113.500.000,00
Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	160.000.000,00	83.500.000,00
Belanja Sewa Photo and Film Equipment	282.000.000,00	153.000.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	574.300.000,00	439.800.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.800.000,00	5.400.000,00
Belanja Sewa Bangunan Parkir	37.500.000,00	0,00
Belanja Sewa Hotel	526.000.000,00	434.400.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	35.100.000,00	21.100.000,00
Belanja Sewa Alat Musik	24.000.000,00	13.000.000,00
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	11.100.000,00	5.100.000,00
Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	3.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	95.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	95.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.070.571.180,00	1.618.019.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	947.950.500,00	567.545.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	986.620.680,00	943.674.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	136.000.000,00	106.800.000,00
Belanja Pemeliharaan	46.892.500,00	82.478.050,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46.892.500,00	76.478.050,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	29.472.500,00	26.103.050,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	2.175.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	400.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	35.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.720.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.200.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	3.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.500.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.600.000,00	10.200.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	6.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya	0,00	6.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	2.769.047.020,00	1.307.184.400,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.769.047.020,00	1.307.184.400,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.652.847.020,00	1.225.284.400,00

		2022	2021
			(Audited)
3.1.1.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<u>Rp 2.065.994.851,00</u>	<u>Rp 2.296.917.409,00</u>

Tabel 4
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Bertambah /Berkurang	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.082.287.522	2.065.994.851	16.292.671	99,22
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	459.488.000	452.835.050	6.652.950	98,55
Belanja Modal Alat Kantor	289.537.000	288.723.550	813.450	99,72
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	169.951.000	164.111.500	5.839.500	96,56
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.069.926.000	1.069.756.000	170.000	99,98
Belanja Modal Komputer	443.647.522	439.496.901	4.150.621	99,06
Belanja Modal Alat Eksplorasi	100.226.000	94.906.900	5.319.100	94,69
Belanja Modal Peralatan Olahraga	9.000.000	9.000.000		100

		2022	2021 (Audited)
3.1.1.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<u>Rp 244.226.000,00</u>	<u>Rp 7.287.500,00</u>

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 244.436.000 dengan realisasi sebesar Rp 244.226.000,00 atau 99,91%. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari:

Tabel 5
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Bertambah/ Berkurang	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	244.436.000	244.226.000	210.000	99,91
Belanja Modal Bahan	20.336.000	20.336.000		100

2022**2021 (Audited)**

3.1.2.1. Aset Lancar **Rp 169.427.600,00** **116.156.000,00**

Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 169.427.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

2022**2021 (Audited)**

3.1.2.1.1. Persediaan **Rp 169.427.600,00** **116.156.000,00**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 169.427.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Persediaan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Persediaan	169.427.600,00	116.156.000,00
Barang Pakai Habis	169.427.600,00	116.156.000,00
Bahan	2.260.000,00	2.090.000,00
Bahan Bakar dan Pelumas	2.260.000,00	2.090.000,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	167.167.600,00	114.066.000,00
Alat Tulis Kantor	68.911.200,00	70.977.000,00
Kertas dan Cover	2.745.000,00	1.383.000,00
Bahan Cetak	80.423.000,00	26.868.000,00
Benda Pos	300.000,00	750.000,00
Bahan Komputer	2.301.000,00	0,00
Perabot Kantor	0,00	76.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.487.400,00	14.012.000,00

2022**2021 (Audited)**

3.1.2.2 Aset Tetap **Rp 11.383.820.891,92** **Rp 4.055.840.915,36**

Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.383.820.891,92 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8
Aset Tetap

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
ASET TETAP	11.383.820.891,92	4.055.840.915,36

Peralatan dan Mesin	9.167.539.991,96	7.145.017.360,96
Gedung dan Bangunan	6.530.435.706,00	34.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	223.891.200,00	21.555.200,00
Akumulasi Penyusutan	-4.538.046.006	-3.144.731.645

2022 **2021 (Audited)**

3.1.2.2.1 Peralatan dan Mesin **Rp9.167.539.991,96** **Rp 7.145.017.360,96**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 9.167.539.991,96 dengan penjelasan mutasi sebagai berikut :

Saldo per 1 Januari 2022			Rp 7.145.017.360,96
Mutasi tambah :			
-	Pembelian	Rp 2.065.994.851,00	
	Reklas Pemesinan: Mechanical Workshop reklas ke Bangunan Gedung kantor	Rp (18.000.000)	
	Reklas Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah ke alat kantor lainnya	Rp 22.176.000,00	
			Rp 2.070.170.851,00
			Rp 9.215.188.211,96
Mutasi kurang :			
-	extracomptable	Rp 4.343.400,00	
-	Mutasi keluar mebel	Rp 7.725.000,00	
-	Mutasi keluar kursi kerja pejabat	Rp 13.971.000,00	
-	Reklas Alat Pembersih ke Beban Sewa Alat Pembersih	Rp 7.254.000,00	
-	Reklas Peralatan Studio Video dan Film ke Bahan Komputer	Rp 8.904.420,00	
-	Reklas Peralatan Permainan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 5.450.400,00	
			Rp 47.648.220,00
Saldo per 31 Desember 2022			Rp. 9.167.539.991,96
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022			Rp(4.220.360.956,60)
Nilai buku per 31 Desember 2022			Rp 4.947.179.035

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 9.167.539.991,96 dengan perhitungan mutasi sebagai berikut:

Penjelasan mutasi peralatan dan mesin:

- a. Penambahan dari pembelian aset yang terdiri dari:
 1. Pembelian Alat Kantor dan Rumah Tangga Senilai Rp 452.835.050,00
 2. Pembelian Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Senilai Rp 1.069.756.000,00
 3. Pembelian Komputer Senilai Rp 439.496.901,00
 4. Pembelian Alat Eksplorasi Senilai Rp 94.906.900,00
 5. Pembelian Peralatan Olahraga Senilai Rp 9.000.000,00
- b. Penambahan dari Reklas
 1. Reklas Pemesinan: Mechanical Workshop reklas ke Bangunan Gedung kantor Senilai Rp 18.000.000,00
 2. Reklas Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah ke alat kantor lainnya Senilai Rp. 22.176.000,00
- c. Pengurangan extracomtable
 1. Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Senilai Rp. 1.232.000
 2. Alat Kantor Lainnya senilai Rp 3.111.400
- d. Pengurangan Mutasi Keluar
 1. Mutasi Mebel ke Biro umum senilai Rp 7.725.000
 2. Mutasi kursi kerja pejabat ke Biro umum senilai Rp 13.971.000
- e. Pengurangan Reklas
 1. Reklas Alat Pembersih ke Beban Sewa Alat Pembersih senilai Rp 7.254.000
 2. Reklas Peralatan Studio Video dan Film ke Bahan Komputer senilai Rp 8.904.420
 3. Reklas Peralatan Permainan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp 5.450.400

Tabel 9
Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Peralatan dan Mesin	9.167.539.991,96	7.145.017.360,96
Alat Angkutan	2.889.522.626,00	2.889.522.626,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	533.500,00	533.500,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.146.267.945,97	2.062.339.295,97
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	864.373.035,99	615.336.885,99
Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.875.000,00	2.875.000,00
Alat Laboratorium	23.754.500,00	0,00
Komputer	2.240.213.384,00	1.574.410.053,00

		2022	2022 Audited)
3.1.2.2.2	Gedung dan Bangunan	Rp 6.530.435.706,00	Rp 34.000.000,00

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 6.530.435.706,00 dengan penjelasan mutasi sebagai berikut :

Saldo per 1 Januari 2022			Rp 34.000.000,00
Mutasi tambah:			
-	Belanja Bangunan Gedung Kantor	Rp 265.416.000,00	
-	Mutasi Masuk dari Biro Umum	Rp 6.193.305.706,00	
-	Reklas Pemesinan: Mechanical Workshop reklas ke Bangunan Gedung kantor	Rp (22.176.000,00)	
-	Reklas Barang Bercorak Kesenian Lainnya ke Bangunan Gedung kantor	Rp 59.890.000	
Total			Rp. 6.530.435.706,00
Saldo per 31 Desember 2022			Rp. 6.530.435.706,00

Tabel 10
Bangunan dan Gedung

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Gedung dan Bangunan	6.530.435.706,00	34.000.000,00
Bangunan Gedung	6.530.435.706,00	34.000.000,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.530.435.706,00	34.000.000,00
Bangunan Gedung Kantor	6.496.435.706,00	0,00
Taman	34.000.000,00	34.000.000,00

	2022	2021 (Audited)
3.1..1.1. Aset Tetap Lainnya	<u>Rp 223.891.200,00</u>	<u>Rp 21.555.200,00</u>

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 223.891.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Aset Tetap Lainnya	223.891.200,00	21.555.200,00
Bahan Perpustakaan	35.104.200,00	14.768.200,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	188.787.000,00	6.787.000,00

Berikut penjelasan mutasi Aset Tetap Lainnya dengan perincian sebagai berikut :

Saldo per 1 Januari 2022			Rp 21.555.200,00
Bertambah:			
-	Belanja Bangunan Gedung Kantor	Rp 244.226.000	
-	Reklas Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah ke alat kantor lainnya	Rp 18.000.000	
Berkurang:			
-	Reklas Barang Bercorak Kesenian Lainnya ke Bangunan Gedung kantor	Rp 59.890.000	
Total			
Saldo per 31 Desember 2022			Rp. 223.891.200,00

		2022	2021 (Audited)
3.1..1.1.2.	Bahan Perpustakaan	<u>Rp 35.104.200,00</u>	<u>Rp 21.555.200,00</u>

Saldo Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 35.104.200,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan dari Buku Umum sejumlah Rp 27.402.500,00 dan Buku Ilmu social sejumlah Rp 7.701.700,00 diperoleh dari Belanja Modal Pengadaan Buku selama tahun 2022

		2022	2021 (Audited)
3.1..1.1.3.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	<u>Rp188.787.000,00</u>	<u>Rp 6.787.000,00</u>

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp188.787.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan Alat Musik sejumlah Rp Rp188.787.000,00 diperoleh dari Belanja Modal Pengadaan Alat Musik selama tahun 2022.

	2022	2021(Audited)
3.1..1.1. Akumulasi Penyusutan	<u>Rp (4.538.046.006,04)</u>	<u>Rp(3.144.731.645,60)</u>

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp (4.538.046.006,04)** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Akumulasi Penyusutan	(4.538.046.006,04)	(3.144.731.645,60)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.220.360.956,60)	(3.144.561.645,60)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.620.035.492,55)	(1.336.620.222,55)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(133.375,00)	(26.675,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(950.868.126,14)	(525.778.039,14)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(289.883.548,13)	(157.735.655,13)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(1.581.250,00)	(1.006.250,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(1.675.712,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.356.183.452,78)	(1.123.394.803,78)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(317.685.049,44)	(170.000,00)

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.3. Ekuitas	<u>Rp 11.553.248.491,92</u>	<u>Rp 4.171.996.915,36</u>

Saldo Ekuitas sebesar Rp11.553.248.491,92 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2022. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
EKUITAS	11.553.248.491,92	4.171.996.915,36
Ekuitas	(15.209.402.995,08)	4.171.996.915,36
Ekuitas	10.339.263.221,36	4.171.996.915,36
Surplus/Defisit-LO	(25.548.666.216,44)	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	26.762.651.487,00	0,00
RK PPKD	26.762.651.487,00	0,00

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.4. Beban	<u>Rp 25.548.666.216,44</u>	<u>Rp 19.670.427.079,93</u>

Realisasi Beban Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 25.548.666.216,44 Jumlah tersebut merupakan beban operasi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban penyusutan dan amortisasi.

	2022	2021 (Audited)
3.1.4.1. <u>Beban Operasi</u>	<u>Rp 24.155.351.856,00</u>	<u>Rp18,971,412,367.00</u>

Realisasi Beban Operasi Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 24.155.351.856,00 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp 6.467.690.216,00 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 17.687.661.640,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021 (Audited)
3.1.4.1.1 <u>Beban Pegawai</u>	<u>Rp 6.467.690.216</u>	<u>Rp 5,732,270,432.00</u>

Realisasi Beban Pegawai Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 6.467.690.216 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11
Beban Gaji dan Tunjangan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Pegawai	6.467.690.216,00	5.732.270.432,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.858.620.263,00	2.804.957.448,00
Beban Gaji Pokok ASN	2.172.401.874,00	2.285.537.020,00
Beban Gaji Pokok PNS	1.643.227.700,00	1.846.542.800,00
Beban Gaji Pokok PPPK	529.174.174,00	438.994.220,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	141.188.590,00	149.509.384,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	177.080.000,00	185.000.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	27.730.000,00	27.500.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	45.555.000,00	54.620.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	91.973.400,00	96.246.180,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.777.361,00	6.519.297,00

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.666.000,00	896.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	254.440.040,00	12.200.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	80.000.000,00	18.000.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	141.100.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	111.028.000,00	13.815.000,00
Beban Obat-Obatan-Obat	740.000,00	255.000,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	970.000,00	1.530.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	648.647.000,00	388.160.000,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.500.000,00	12.500.000,00
Beban Jasa	12.609.698.610,00	10.235.902.700,00
Beban Jasa Kantor	8.578.838.430,00	7.571.948.700,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	496.350.000,00	395.925.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	516.000.000,00	676.120.000,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	3.000.000,00
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.837.900.000,00	1.651.100.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.053.750.000,00	678.750.000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	0,00	337.200.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	0,00	900.000,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	176.000.000,00	419.200.000,00
Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	101.650.000,00	149.000.000,00

Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	34.077.000,00	34.900.000,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	619.005.190,00	981.605.000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.708.525.440,00	2.216.644.500,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.084.000,00	8.676.000,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.864.200,00	7.500.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.632.600,00	11.428.200,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.255.889.000,00	585.035.000,00
Beban Sewa Electric Generating Set	0,00	3.500.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	14.100.000,00	10.200.000,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	109.000.000,00	62.000.000,00
Beban Sewa Mebel	5.540.000,00	2.085.000,00
Beban Sewa Alat Pembersih	7.254.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	268.000.000,00	146.000.000,00
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	198.495.000,00	11.250.000,00
Beban Sewa Alat Studio Lainnya	211.500.000,00	113.500.000,00
Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	160.000.000,00	83.500.000,00
Beban Sewa Photo and Film Equipment	282.000.000,00	153.000.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	574.300.000,00	439.800.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.800.000,00	5.400.000,00
Beban Sewa Bangunan Parkir	37.500.000,00	0,00
Beban Sewa Hotel	526.000.000,00	434.400.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	35.100.000,00	21.100.000,00
Beban Sewa Alat Musik	24.000.000,00	13.000.000,00
Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	11.100.000,00	5.100.000,00
Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	3.000.000,00

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	95.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	95.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.070.571.180,00	1.618.019.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	947.950.500,00	567.545.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	986.620.680,00	943.674.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	136.000.000,00	106.800.000,00
Beban Pemeliharaan	46.892.500,00	82.478.050,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46.892.500,00	76.478.050,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	29.472.500,00	26.103.050,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	2.175.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	400.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	0,00	35.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.720.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.200.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	0,00	3.000.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.500.000,00	0,00

Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.600.000,00	10.200.000,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	6.000.000,00
Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya	0,00	6.000.000,00
Beban Perjalanan Dinas	2.769.047.020,00	1.307.184.400,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.769.047.020,00	1.307.184.400,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.652.847.020,00	1.225.284.400,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	116.200.000,00	81.900.000,00

	2022	2021 (Audited)
3.1.4.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi	<u>Rp 1.393.314.360,44</u>	<u>Rp 672.878.600,75</u>

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 672.878.600,75 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.393.314.360,44	699.014.713,68
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.075.799.311,00	698.844.713,68
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	317.515.049,44	170.000,00

	2022	2021 (Audited)
3.1.5 <u>Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO</u>	<u>Rp (25.548.666.216,44)</u>	<u>Rp (19.670.427.080,68)</u>

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp 6.167.266.306,00 dijelaskan dalam rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Debet	Kredit
1.	Mutasi Masuk Bangunan dan Gedung	6.193.305.706	

2.	Mutasi keluar Kursi Kerja Pejabat	13.971.000
3.	Mutasi keluar mebel	7.725.000
4..	Reklas Extracountable Alat Rumah tangga Lainnya	3.111.400
5.	Reklas Extracountable Alat Kantor Lainnya	400.000
	Selisih debit dan kredit	6.167.266.306,00

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp (25.548.666.216,44) berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp 0,00 dikurangi Beban sebesar Rp 25.548.666.216,44.

3.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Ekuitas sebesar Rp 11.553.248.491,92 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2022. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah dengan Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain dengan perhitungan sebagai berikut.

URAIAN	2022	2021
Ekuitas Awal	4.171.996.915,36	2.726.254.570,04
Surplus / (Defisit) - Lo	(25.548.666.216,44)	(19.670.427.080,68)
Rk Ppkd	26.762.651.487,00	21.184.928.416,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-Lain	6.167.266.306,00	(68.758.990,00)
Ekuitas Akhir	11.553.248.491,92	4.171.996.915,36

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD

Paniradya Kaistimewan DIY merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Bagian Pelayanan dan Umum;
 1. Subbagian Pelayanan Parampara Praja
 2. Subbagian Hubungan Antar Lembaga
 3. Subbagian Umum
- b. Bidang Perencanaan dan Pengendalian
 1. Subbidang Perencanaan Keistimewaan
 2. Subbidang Pengendalian Keistimewaan
 3. Subbidang Data dan Teknologi Informasi
- c. Bidang Tata Cara Kelembagaan Pertanahan dan Tata Ruang;
 1. Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Tata Cara dan Kelembagaan
 2. Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Pertanahan dan Tata Ruang
- d. Bidang Kebudayaan
 1. Subbidang Perencanaan Kebudayaan
 2. Subbidang Pengendalian Kebudayaan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paniradya Kaistimewan DIY mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program/kegiatan keistimewaan serta pelayanan Parampara Praja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut *Paniradya Kaistimewan DIY* mempunyai fungsi:

- a. perumusan program kerja;
- b. pengordinasian penyusunan perencanaan program keistimewaan;
- c. penyelenggaraan pengendalian program keistimewaan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dibidang perencanaan program keistimewaan;
- e. penyelenggaraan pelayanan Parampara Praja;
- f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas *Paniradya Kaistimewan*; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi masing-masing bagian di *Paniradya Kaistimewan DIY* berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Bagian Pelayanan dan Umum

Bagian Pelayanan dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan Parampara Praja, hubungan antar lembaga, ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kinerja *Paniradya Kaistimewan*.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bagian Pelayanan dan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyusunan program *Paniradya Kaistimewan*;
- c. fasilitasi penyusunan program kerja Parampara Praja;
- d. fasilitasi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Parampara Praja;
- e. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Parampara Praja;
- f. fasilitasi penyusunan laporan kegiatan Parampara Praja;
- g. koordinasi antar lembaga dengan kraton dan kadipaten;
- h. koordinasi antar lembaga perangkat daerah;
- i. pengelolaan kearsipan *Paniradya Kaistimewan*;
- j. pengelolaan keuangan *Paniradya Kaistimewan*;
- k. pengelolaan barang *Paniradya Kaistimewan*;
- l. pengelolaan kerumahtanggaan *Paniradya Kaistimewan*;
- m. pengelolaan kepegawaian *Paniradya Kaistimewan*;
- n. pelaksanaan pelayanan umum dan penyusunan laporan *Paniradya Kaistimewan*;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program bagian Pelayanan dan Umum;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas *Paniradya Kaistimewan*; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- q.

2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kegiatan keistimewaan dan pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Perencanaan Keistimewaan;
- c. koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Perencanaan Keistimewaan;
- d. koordinasi penyusunan perencanaan keistimewaan;
- e. perumusan program keistimewaan;
- f. penyusunan program keistimewaan;

- g. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- h. pengumpulan dan penyusunan data perencanaan serta hasil pelaksanaan program keistimewaan;
- i. pengendalian dan evaluasi perencanaan program keistimewaan;
- j. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program keistimewaan;
- k. penyusunan laporan kinerja keistimewaan;
- l. penyusunan evaluasi kinerja keistimewaan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan dan Pengendalian; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tata Cara, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang

Bidang Tata Cara, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kegiatan Tata Cara, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Tata Cara, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan rencana dan program di Bidang Tata Cara, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
- c. pengelolaan data di Bidang Tata Cara, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
- d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan di Bidang Tata Cara, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
- e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program di Bidang Tata Cara, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran Bidang Tata Cara, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan Tata Cara, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
- h. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan Tata Cara, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan Tata Cara, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan program urusan Tata Cara, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kegiatan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan rencana dan program di Bidang Kebudayaan;
- c. pengelolaan data di Bidang Kebudayaan;
- d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan di Bidang Kebudayaan;
- e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program di Bidang Kebudayaan;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran Bidang Kebudayaan;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan Kebudayaan;
- h. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan Kebudayaan;
- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program urusan Kebudayaan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan program urusan Kebudayaan;
dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2022 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2021 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset.

Perencanaan anggaran Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2022
PANIRADYA PATI

Aris Eko Nugroho, S.P, M.Si
NIP. 19721101 199703 1 005